



LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH

---

**2018**

**(LKjIP)**

**KABUPATEN PATI**

**ALUN PATI**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
INSPEKTORAT**

Jalan Setyabudi No. 34 A Telp. (0295) 381842 Pati - Kode Pos 59115

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pati, 12 Maret 2019

Inspektur Kabupaten Pati



Drs. SUMARSONO HADI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19610109 198403 1 006





## KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillahirobbil'alaamiin. Bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna memenuhi kewajiban, Pemerintah Kabupaten Pati menyusun Laporan Kinerja Tahunan akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 2018 berakhir. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas (pertanggung jawaban) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur (keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati) kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Pati selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan target-target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Pati. Di dalamnya memuat gambaran mengenai target-target sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Daerah. Visi Bupati Pati periode 2017-2022 adalah, "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK". Guna mewujudkan visi dimaksud telah dirumuskan 8 (delapan) misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, sebagai berikut :


1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tahun anggaran 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017-2022. Berkat kerja sama yang baik antar Perangkat Daerah dengan semboyan "Guyup Rukun" "Noto Projo Mbangun Deso", sehingga target-target sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dapat dicapai bahkan pada urusan tertentu telah melebihi target yang ditetapkan. Dari 14 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 14 IKU telah memenuhi kriteria **sangat tinggi (100%)**.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada Para Kepala Perangkat Daerah yang dengan semangat tidak mengenal lelah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Pati, 14 Maret 2019  
BUPATI PATI

  
HARYANTO, SH, MM, M.Si



## DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pemerintahan.....	1
1.2 Kepegawaian.....	2
1.3 Kondisi Geografis dan Iklim Daerah.....	3
1.4 Gambaran Umum Demografi.....	5
1.5 Isu-isu Strategis.....	6
1.6 Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022.....	9
2.2 Indikator Kinerja.....	10
2.3 Perjanjian Kinerja.....	12
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja.....	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.2.1 Terwujudnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial.....	19
3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan Akses pendidikan.....	20
3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung Kualitas sumber daya manusia.....	22
3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan.....	24
3.2.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.....	26
3.2.6 Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah.....	29
3.2.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.....	30
3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas daerah.....	32
3.2.9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	34
3.2.10 Menurunnya resiko bencana.....	35
3.3 Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman:
1.1	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2014 - 2018	6
1.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2014 - 2018	6
2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	9
2.2	Matrik program kegiatan dengan perjanjian kinerja Kabupaten Pati 2018	13
2.3	Target Belanja Daerah	16
2.4	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2018	17
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018	19
3.3	Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketentraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	20
3.4	Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	20
3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	21
3.6	Perbandingan Data IPM	22
3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	22
3.8	Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	24
3.9	Capaian Kinerja Penurunan Kemiskinan	24
3.10	Perbandingan Indikator Penurunan Kemiskinan	25
3.11	Capaian Kinerja Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	26
3.12	Perbandingan Data Indikator Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	27
3.13	Capaian Kinerja Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah	29
3.14	Data PDRB ADHK	29
3.15	Perkembangan PDRB di Kabupaten Pati Tahun 2015 - 2017	29
3.16	Capaian Kinerja Menguatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	30

Tabel	Judul	Halaman:
3.17	Perbandingan data per tahun Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	31
3.18	Capaian Kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	32
3.19	Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	34
3.20	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	34
3.21	Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana	35
3.22	Kejadian Bencana tahun 2018	36
3.23	Perbandingan Indeks Resiko Bencana	36
3.24	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	37
3.25	Anggaran Belanja Daerah Perubahan	37
3.26	Realisasi anggaran belanja prioritas (dalam rupiah) Tahun 2018	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman:
1.1	Peta Kabupaten Pati	3
3.1	<i>Smart City</i> Kabupaten Pati	28
3.2	Karang Taruna Kabupaten Pati mengikuti aksi penanaman mangrove di pesisir pantai Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil.	35
3.3	Banjir wilayah Kec. Jakenan	36



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman:
1.1	Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018	2
3.1	Nilai Investasi KAB. PATI	31
3.2	Panjang Jalan Kabupaten Pati menurun Kondisi jalan tahun 2015 - 2017	33
3.3	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman:
I	Penetapan Kinerja 2018	41

## BAB I PENDAHULUAN

**T**ata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

### 1.1 PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Pati tidak mengalami perubahan yaitu 21 kecamatan. Pada tahun 2006 jumlah desa/kelurahan bertambah menjadi 406 desa/kelurahan dari 405 desa/kelurahan, karena ada pemekaran desa di Kecamatan Gabus yaitu Desa Pantirejo, yang dipecah menjadi dua desa yaitu Desa Pantirejo dan Desa Kosekan. Tahun 2015 jumlah RT sebanyak 7.518 RT, tahun 2016 sebanyak 7.585 RT, sedangkan pada tahun 2017 sampai sekarang 2018 ada 7252 RT.

Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan struktur organisasi di Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39-64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2 Rumah

Sakit Umum Daerah dan 21 Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Pemilu legislatif tahun 2014 menghasilkan Anggota DPRD Kabupaten Pati 2014-2019 menurut keanggotaan Partai Politik sebanyak 50 orang. Didominasi oleh PDI-P dan Partai Gerindra yang menyumbangkan anggotanya sebanyak 8 orang atau 16 persen dari total anggota DPRD Kabupaten Pati. Jumlah terbanyak kedua ditempati oleh Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB dengan jumlah anggotanya 6 orang. Sedangkan urutan ke tiga ditempati oleh PKS dengan jumlah anggota 5 orang.

Tahun 2017 diadakan pemilihan Hasil akhir rekapitulasi suara secara menyeluruh menunjukkan pasangan calon (Paslon) Haryanto-Saiful Arifin (Harfin), keluar sebagai pemenang Pilkada di Bumi Mina Tani. Paslon tunggal yang diusung oleh delapan partai itu mendapat 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah, dalam gelaran pilkada kali ini suara tak sah yang ada mencapai 14.984 sehingga total suara sah dan tidak sah, mencapai 712.421 suara. Jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pati yang mencapai 1.034.256, maka tingkat partisipasi pemilih yang ada sekitar 68,9 persen, hali ini jauh di bawah target partisipasi yang dipatok KPU Pusat dalam gelaran Pilkada serentak 2017, yakni 77,5 persen.

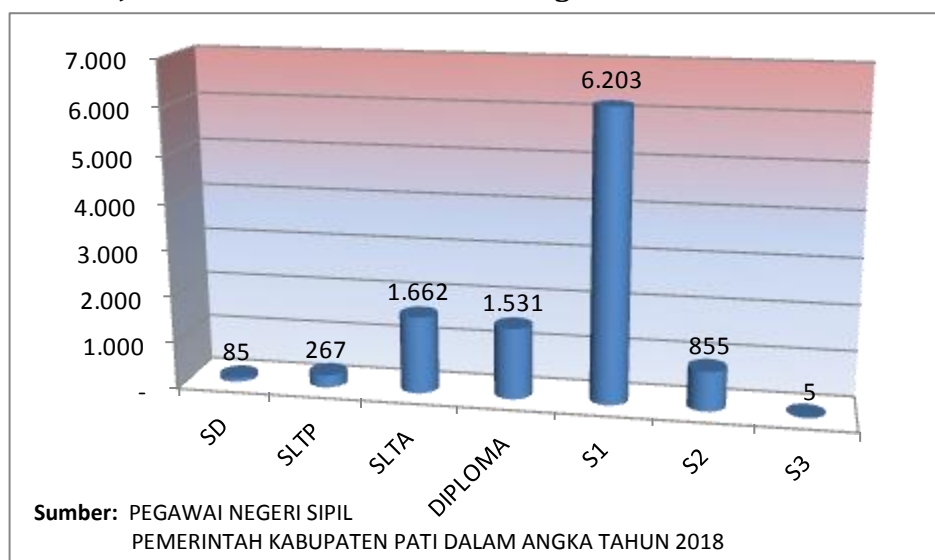
## 1.2 KEPEGAWAIAN

Jumlah PNS terbanyak pada tahun 2018 adalah golongan III sebanyak 4.981 atau 44,1% dari total pegawai. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah PNS terbanyak masih golongan III sebanyak 4.726 atau 44,6% dari total pegawai 10.608 orang.

Selanjutnya perbandingan PNS menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

**Grafik 1.1**

**Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018**



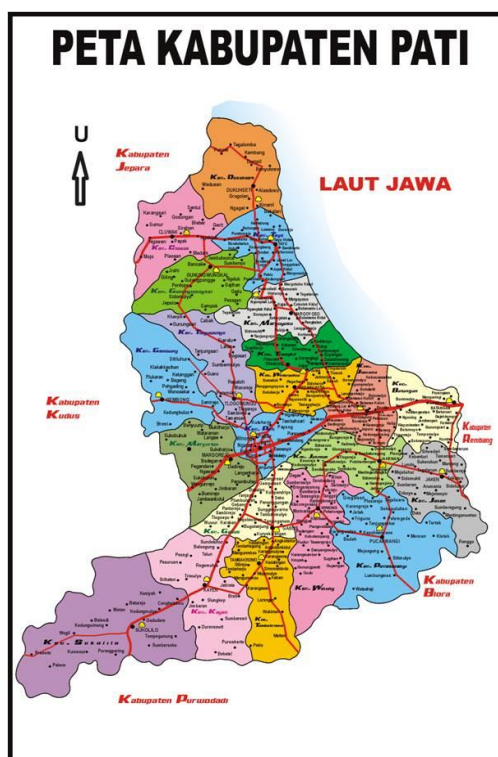
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal PNS di Kabupaten Pati yang terbanyak adalah Sarjana (S-1) sebanyak 6.203 orang atau 58,47 persen.

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.



### 1.3 KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM DAERAH

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 110<sup>o</sup>,50' - 111<sup>o</sup>,15' Bujur Timur (BT) dan 6<sup>o</sup>, 25' - 7<sup>o</sup>,00' Lintang Selatan (LS) dan mempunyai luas wilayah 150.368 Ha. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten pati sangat strategis karena berada diantara kota-kota pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui jalan nasional Pantura yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, dan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan. Secara administratif Kabupaten Pati terbagi dalam 21 Kecamatan yang terdiri dari 406 Desa/Kelurahan.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Pati

Secara topografi, wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian utara; daratan rendah, membujur di tengah sampai utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Dengan kondisi topografi demikian, Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2 – 624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus dengan rata-rata ketinggian 3,92 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Gembong dengan rata-rata ketinggian 219,36 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum, di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Sayangnya, pada musim kemarau, kebanyakan dari

sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Secara keseluruhan iklim dipengaruhi oleh letak geografisnya. Maka dari itu, Kabupaten Pati beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2017 sebanyak  $\pm$  2.200 mm dengan 119 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 377 mm dengan hari hujan 25 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan sebesar 8 mm dengan hari hujan sebanyak 119 hari. Suhu udara terendah di Kabupaten Pati adalah 23°C dan suhu tertinggi 39°C.

Penggunaan lahan di Kabupaten Pati menurut data BPS pada tahun 2017 terdiri dari 59.299 ha (39,44%) lahan sawah dan 91.069 ha (60,56%) lahan bukan sawah. Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030, Peruntukan Wilayah Kabupaten Pati terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Apabila dirinci luasan penggunaan kawasan Budidaya di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 21.586 Ha dibagi menjadi hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.695 Ha dan hutan produksi tetap dengan luas 19.891 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332Ha.

3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249Ha.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar dan pengolahan ikan. Kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan area tangkapan antara 0-3 mil dari pantai, kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai, dan kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan area tangkapan lebih dari 6 mil garis pantai. Luas perikanan budidaya tambak mencapai 10.606 Ha, dan pengembangan perikanan budidaya air tawar mencapai 294 Ha.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas : Mineral, batu bara dan Minyak serta gas bumi.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

a. Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi diKecamatan Margorejo (306Ha) dan Kecamatan Pati (200Ha).

b. Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan (318Ha), Kecamatan Juwana (102Ha).

c. Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu (30Ha), Kecamatan Trangkil (24Ha), Kecamatan Margoyoso (53Ha), Kecamatan Tambakromo ( 300Ha), Kecamatan Kayen (48Ha), Kecamatan Sukolilo (117Ha).

d. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan.

#### 8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan dimasing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesasaan.

Di samping beberapa potensi wilayah yang bisa dikembangkan, Kabupaten Pati juga merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2013, Kabupaten Pati merupakan daerah yang beresiko tinggi terjadi bencana dengan skor 174 atau kategori tinggi dan menempati peringkat 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah sedangkan secara nasional menempati rangking 153.

Ada beberapa bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Pati. Pada musim penghujan Kabupaten Pati merupakan daerah yang rawan terhadap bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun angin topan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kabupaten Pati yang memiliki 93 sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40% dan wilayah yang rawan longsor yaitu wilayah Kecamatan Cluwak, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong dan Pucakwangi. Sedangkan pada musim kemarau di sebagian wilayah Kabupaten Pati juga terjadi bencana kekeringan. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang cukup panjang ( ± 60 km ), bencana gelombang ekstrim dan abrasi juga bisa terjadi di kabupaten ini. Lebih lanjut menurut Badan Geologi, di sebagian wilayah Kabupaten Pati mempunyai tingkat ancaman rendah sampai dengan tinggi untuk bencana gempa bumi. Di Kabupaten Pati pernah menjadi episenter gempa bumi pada tahun 1890 M.

### 1.4 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Komposisi penduduk di Kabupaten Pati bila diamati dari piramida penduduk pada tahun 2018 menuju ke arah yang lebih baik, ditunjukkan dengan adanya arah perkembangan penduduk yang hampir sama dari penduduk usia 0-4 tahun sampai dengan penduduk usia 45-49 tahun. Komposisi penduduk juga dapat dihubungkan dengan Dependency Ratio (DR) / Angka Ketergantungan, yang menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun) dan (65+).

Angka ketergantungan tahun 2018 sebesar 45,63 persen, berarti setiap 100 penduduk yang produktif menanggung sekitar 45 penduduk yang tidak produktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat pada tabel indikator kependudukan Kabupaten. Pati, namun tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 sebesar 0,53 persen lebih rendah dibanding tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Dengan luas wilayah sekitar 1.503 kilometer persegi rata-rata setiap kilometer persegi ditempati penduduk sebanyak 834 jiwa / kilometer persegi pada tahun 2018, meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 829 jiwa / kilometer persegi. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Sex ratio tahun 2017 nilainya lebih kecil dari 100 persen yaitu sebesar 94 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa / km <sup>2</sup> )
2014	1.225.603	815
2015	1.232.889	820
2016	1.239.989	825
2017	1.246.691	829
2018	1.253.299	834

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2018*

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Berdasarkan Data BPS Jawa Tengah Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (829 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (479), Wonogiri (524), Rembang (620), Grobogan (691), Purworejo (691), Wonosobo (797), dan Cilacap (800).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2014-2018**

JENIS KELAMIN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
LAKI-LAKI	593.813	597.308	600.723	603.907	607.002
PEREMPUAN	631.790	635.581	639.266	642.784	646.297
TOTAL	1.225.603	1.232.889	1.239.989	1.246.691	1.253.299
LAJU PERTUMBUHAN	0,63	0,59	0,58	0,54	0,53

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2018*

Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2014-2018, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

## 1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022. Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pati serta memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan pada tahun 2018.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Pati hingga saat ini masih cukup lambat, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih berada di kisaran 147.100 jiwa atau 11,95%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, diikuti dengan lesunya iklim usaha turut memberikan dampak pada perlambatan penurunan angka pengangguran daripada tahun sebelumnya.

Perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit menular. Meningkatnya kasus Kematian Ibu (AKI) untuk tahun 2014 sebesar 17 kasus meningkat menjadi 21 kasus di tahun 2015, kemudian untuk kasus kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014 sebesar 193 kasus meningkat menjadi 198 kasus di tahun 2015. Pada kasus sebaran



penyakit HIV/AIDS sejak tahun 1996 s.d 2014 terdapat sebanyak 665 orang dengan korban meninggal dunia sebanyak 93 orang.

Sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu adanya perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan meliputi penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Di tengah ketidakpastian harga komoditas pangan yang cenderung kian merangkak naik sehingga menggerus daya beli masyarakat masyarakat kelas menengah bawah dan juga mendorong inflasi yang cukup signifikan, perlu upaya untuk membuat kebijakan yang difokuskan pada aspek ketersediaan, aksesibilitas dan affordability (harga terjangkau). Disamping itu pembenahan tata niaga komoditas pangan perlu diawasi sehingga dapat menutup celah para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis komoditas yang sangat strategis ini. Diperlukan upaya sinergitas antar sektor yang menangani sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antar pemangku kepentingan yang cenderung saling menyalahkan atau mencari pembenaran sepihak.

Era perdagangan bebas telah memasuki tahap implementasi yang kian waktu semakin luas cakupannya baik dari aspek geografis, poduk atau komoditas yang diperdagangkan serta kesepakatan-kesepakatan teknis hubungan multilateral dalam perpektif perdagangan bebas.

Dampak negative dari implementasi perdagangan bebas internasional/regional baik ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) maupun ASEAN Economic Community (AEC) yaitu pada aspek daya saing produk UMKM. Mengingat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan bisnisnya seperti kualitas SDM rendah, sulitnya akses pada sektor keuangan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, inovasi maupun pada segi pemasaran.

Pemerintah Daerah harus terus berupaya mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai fasilitasi maupun bantuan teknis/permodalan guna mengangkat daya saing mereka ke tingkat yang lebih kompetitif.

Dan tentunya dalam mendorong pengembangan usaha UMKM didasarkan pada penggalian, pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi juga produk yang kompetitif.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Baik buruknya infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, pengentasan kemiskinan maupun mutu lingkungan hidup.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Pati ditandai dengan masih tingginya persentase jalan dan jaringan irigasi dalam kondisi rusak, rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan persampahan, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur tersebut memerlukan perhatian oleh pemerintah.

## **1.6 SISTEMATIKA**

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pati Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pati Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran setrategis dan indikator RPJMD yang digunakan dalam RKPD dan perjanjian kinerja tahun 2018, program beserta anggarannya.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran, serta analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- 2) Lain-lain.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Pati mengikuti hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2017.

### 2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan pembangunan daerah menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu 5 tahun, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran menjabarkan tujuan berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sesuai amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor: 050/4936/SJ/0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dilakukan pemeriksaan penyelarasan sasaran pembangunan daerah dengan RPJMN.

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<i>TUJUAN</i>	<i>INDIKATOR TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
<b><i>Misi 1 Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;</i></b>		
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat</li> <li>Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya</li> </ul>
<b><i>Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan</i></b>		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	IPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat</li> <li>Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan</li> </ul>
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan</li> </ul>
	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	
<b>Misi 3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan</b>		
4. Penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin</li> <li>Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan social</li> </ul>
	Indeks Gini	
	PDRB Perkapita (Rp.)	
<b>Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan public</b>		
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten</li> <li>Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah</li> </ul>
<b>Misi 5: Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja</b>		
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Nilai PDRB ADHK (=000.000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</li> <li>Meningkatnya produktivitas KUM</li> </ul>
<b>Misi 6: Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.</b>		
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/sector pertanian, perdagangan dan industry</li> <li>Meningkatnya Investasi Daerah</li> <li>Meningkatnya daya saing daerah</li> <li>Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</li> </ul>
	Inflasi daerah (%)	
<b>Misi 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.</b>		
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</li> </ul>
<b>Misi 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan</b>		
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya kerusakan lingkungan</li> </ul>
10. Menurunnya risiko bencana	Penurunan indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana</li> </ul>

## 2.2 INDIKATOR KINERJA

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dalam menjawab isu strategis Indikator kinerja utama yang digunakan adalah,

- Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya

### a. Persentase Penanganan Gangguan Kemanan dan Ketertiban Sosial

Angka ini diperoleh dari 3 variabel yang mengukur keadaan ketentraman dan ketertiban umum. Yaitu, prosentase penanganan penyakit masyarakat, penanganan kriminal dan penanganan pelanggaran K3 yang mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya Sumber



data: Data gangguan ketentraman dan ketertiban umum Penanggung jawab: Satpol PP Kab. Pati

- Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan
  - a. **IPM**

Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).  
Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia
  - a. **IPG (Indeks Pembangunan Gender)**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.  
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
  - b. **IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)**

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.  
IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
- Penurunan tingkat kemiskinan
  - a. **Tingkat Kemiskinan**

Persentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
  - b. **Indeks Gini**

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
  - c. **PDRB Perkapita**

Nilai PDB atau PDRB Atas dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu, PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau persatu orang penduduk.  
PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
  - a. **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indek reformasi birokrasi , Menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam 8 area perubahan, adalah angka yang dihasilkan oleh PMPRB, Permenpan No 14 tahun 2014. Semakin tinggi angka PMPRB berarti reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik.
- Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah
  - a. **Nilai PDRB ADHK (=000.000)**

Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

- Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
  - a. Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi**  
Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa
  - b. Inflasi daerah**  
IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.  
  
IHK= Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.  
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
  - a. Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar Pelayanan**  
Mengambarkan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan dalam yang di tentukan oleh kementerian Pekerjaan Umum
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup  
IPA = indeks pencemaran air  
IPU = indeks pencemaran udara  
ITV = indeks tutupan vegetasi  
  
Indek kualitas lingkungan hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan hutan.
- Menurunnya risiko bencana
  - a. Penurunan indeks risiko bencana**  
Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitudo dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati 2018 mengalami proses pembahasan dalam menentukan APBD Kabupaten Pati 2018 yang memuat program dan kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

Pemerintah Kabupaten Pati akan melaksanakan APBD untuk mewujudkan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2018 ( lampiran I ), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pati. Ada target dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan lebih optimis dari Rencana

Kinerja Tahunan yang telah disusun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tabel berikut memberikan gambaran program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati di tahun 2018 sesuai dengan APBD Kabupaten Pati untuk mendukung tercapainya sasaran sesuai dengan target-target indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Pati tahun 2018:

**Tabel 2.2**  
**MATRIK PROGRAM KEGIATAN DENGAN**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PATI 2018**

TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM				
<p>1. <b>Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i></td> <td>51,16</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2018	<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	51,16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</li> <li>4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>5. Program pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</li> <li>9. Program perencanaan sosial dan budaya</li> <li>10. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</li> <li>11. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</li> <li>12. Program pendidikan politik masyarakat</li> <li>13. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</li> </ol>
Indikator Utama	Target 2018				
<i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	51,16				
<p>2. <b>Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Utama</th> <th>Target 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IPM</i></td> <td>69,82</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2018	<i>IPM</i>	69,82	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Program Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</li> <li>17. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"</li> <li>18. Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"</li> <li>19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas</li> <li>20. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</li> <li>21. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</li> <li>22. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>23. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>24. Program Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>25. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat</li> <li>26. Program Pendidikan Non Formal</li> <li>27. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</li> <li>28. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>29. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>30. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</li> <li>31. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya</li> <li>32. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>33. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>34. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li> <li>35. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>36. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</li> <li>37. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</li> <li>38. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</li> <li>39. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> <li>40. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> </ol>
Indikator Utama	Target 2018				
<i>IPM</i>	69,82				
<p>3. <b>Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>41. Program Keluarga Berencana</li> <li>42. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan</li> </ol>				

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM
<b>manusia</b>		Perempuan
Indikator Utama	Target 2018	43. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
<i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,01	44. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
<i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	66	45. Program pelayanan kontrasepsi
		46. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		47. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
		48. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
<b>4. Penurunan tingkat kemiskinan</b>		49. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Indikator Utama	Target 2018	50. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
<i>Tingkat kemiskinan</i>	10,53	51. Program Pengembangan Perumahan
<i>Indeks Gini</i>	0,33	52. Program pengembangan wilayah transmigrasi
<i>PDRB Perkapita</i>	27.754.932	53. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
		54. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		55. Program transmigrasi regional
		56. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
		57. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
		58. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
		59. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		60. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
<b>5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		61. Program peningkatan disiplin aparatur
Indikator Utama	Target 2018	62. Program Pendidikan Kedinasan
<i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63	63. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		64. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		65. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
		66. Program Penataan Administrasi Kependudukan
		67. Program pengembangan data/informasi
		68. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
		69. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		70. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		71. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
		72. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
		73. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		74. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
		75. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
		76. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
		77. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		78. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
		79. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
		80. Program Penelitian dan Pengembangan
		81. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		82. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		83. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik
		84. Program kerjasama informasi dengan mas media
		85. Program perencanaan pembangunan daerah
		86. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
		87. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
<b>6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah</b>		88. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Utama	Target 2018	89. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
<i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	26.906.244	90. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		91. Program pengembangan destinasi pariwisata
		92. Program pengembangan pemasaran pariwisata
		93. Program pengembangan industri kecil dan menengah
		94. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		95. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
		96. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
		97. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		98. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi
		99. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
		100. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan



TUJUAN DAN INDIKATORNYA	PROGRAM						
	101. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 102. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 103. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 104. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 105. Program peningkatan produksi hasil peternakan 106. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 107. Program pengembangan perikanan tangkap 108. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 109. Program peningkatan produksi peternakan 110. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 111. Program pengembangan budidaya perikanan 112. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial						
<b>7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah</b>	113. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 114. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 115. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 116. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 117. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 118. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 119. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 120. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 121. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 122. Program peningkatan peran serta kepemudaan 123. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 124. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 125. Program pengembangan Kemitraan 126. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 127. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 128. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 129. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 130. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 131. Program penataan struktur industri 132. Program pengembangan sistem informasi pertanahan 133. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 134. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 135. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 136. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 137. Program perencanaan pembangunan ekonomi 138. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 139. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 140. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator Utama</th> <th style="text-align: center;">Target 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i></td> <td style="text-align: center;">5,33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Inflasi Daerah</i></td> <td style="text-align: center;">3,00 – 5,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2018	<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,33	<i>Inflasi Daerah</i>	3,00 – 5,00	
Indikator Utama	Target 2018						
<i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,33						
<i>Inflasi Daerah</i>	3,00 – 5,00						
<b>8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	141. Program pembangunan jalan dan jembatan 142. Program Peningkatan Jalan & Jembatan 143. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 144. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 145. Program pengaturan jasa usaha konstruksi 146. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 147. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 148. Program peningkatan pelayanan angkutan 149. Program pembangunan turap/talud/bronjong 150. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 151. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 152. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 153. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 154. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 155. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 156. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 157. Program pembangunan sistem informasi/data base infrastruktur 158. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator Utama</th> <th style="text-align: center;">Target 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i></td> <td style="text-align: center;">70,03</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2018	<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	70,03			
Indikator Utama	Target 2018						
<i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	70,03						
<b>9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>	159. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 160. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator Utama</th> <th style="text-align: center;">Target 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Indikator Utama</td> <td style="text-align: center;">Target 2018</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Utama	Target 2018	Indikator Utama	Target 2018			
Indikator Utama	Target 2018						
Indikator Utama	Target 2018						

TUJUAN DAN INDIKATORNYA		PROGRAM
<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	53,99	161. Program peningkatan pengendalian polusi 162. Program Perencanaan Tata Ruang 163. Program Pemanfaatan Ruang 164. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 165. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 166. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 167. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 168. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 169. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 170. Program Pengembangan Kinerja Pergolahan Persampahan
<b>10. Menurunnya risiko bencana</b>		171. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 172. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 173. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
<b>Indikator Utama</b>	<b>Target 2018</b>	
<i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	164	

Karena pada tahun 2018 aplikasi perencanaan dan penganggaran masih dalam proses integrasi dan proses pengelompokan program pendukung dalam Perjanjian Kinerja dilakukan manual, terdapat program yang diidentifikasi berbeda namun sebenarnya merupakan satu kesatuan Program dan jumlah anggarannya dapat digabungkan. Program-program tersebut adalah program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .

#### 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran belanja Kabupaten Pati Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 2.647.132.050.000,00 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.834.973.661.000,00 (atau 69,32 persen dari total anggaran Belanja) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 812.158.389.000,00 (atau 30,68 persen dari total anggaran Belanja).

**Tabel 2.3**  
**Target Belanja Daerah**

Uraian	Target (Rp)	%
<b>Belanja Tidak langsung</b>	1.834.973.661.000,00	69,32%
<b>Belanja Langsung</b>	812.158.389.000,00	30,68%
<b>Total belanja</b>	2.647.132.050.000,00	100,00%

Sumber: APBD Kab. Pati, 2018

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang utama pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dan program-program pendukung, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 665.336.492.844,00 atau sebesar 58,69 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 468.221.887.156,00 atau 41,31 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, tujuan pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses

pendidikan dengan besaran anggaran 48,12 persen dari total belanja utama. Tujuan lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah sebesar 24,12 persen dari total anggaran belanja utama. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia hanya sebesar 1,37 persen dan anggaran untuk Menurunnya risiko bencana hanya sebesar 0,36 persen dari total anggaran belanja langsung utama yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja.

**Tabel 2.4**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan**  
**Tahun Anggaran 2018**

<i>TUJUAN SASARAN TRATEGIS</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>%</i>
1) Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	10.181.813.775	1,53%
2) Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	320.157.109.750	48,12%
3) Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	9.116.283.964	1,37%
4) Penurunan tingkat kemiskinan	5.368.202.925	0,81%
5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	55.466.459.530	8,34%
6) Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	23.399.946.750	3,52%
7) Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	53.743.069.050	8,08%
8) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	160.495.051.100	24,12%
9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25.001.176.200	3,76%
10) Menurunnya risiko bencana	2.407.379.800	0,36%
	665.336.492.844	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**P**erbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari SAKIP itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Jadi, akuntabilitas bukanlah sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja atau juga disebut *performance* dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*. Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi/instansi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sesuai sasaran yang dituju, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK), untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2018. Adapun hasil pengukuran

target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO	TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAP KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1. <i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	51,16	73,99	144,63	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2. <i>IPM</i>	69,82	70,95	101,62	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3. <i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,01	92,52	100,56	Sangat Tinggi
		4. <i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	66	69,02	104,58	Sangat Tinggi
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5. <i>Tingkat kemiskinan</i>	10,53	9,9	105,98	Sangat Tinggi
		6. <i>Indeks Gini</i>	0,33	0,31	106,06	Sangat Tinggi
		7. <i>PDRB Perkapita</i>	27.754.932	31.816.114	114,63	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. <i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63	69,15	109,76	Sangat Tinggi
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	9. <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	26.906.244	29.012.457	107,83	Sangat Tinggi
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	10. <i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,33	5,5	103,19	Sangat Tinggi
		11. <i>Inflasi Daerah</i>	3,00 – 5,00	2,77	107,67	Sangat Tinggi
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	12. <i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	70,03	81,72	116,70	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	53,99	51,20	94,83	Sangat Tinggi
10	Menurunnya risiko bencana	14. <i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	164	157,41	104,02	Sangat Tinggi

Dari 14 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 14 IKU telah memenuhi kriteria **sangat tinggi (100%)**.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.

Pemerintah Kabupaten Pati berupaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial dan melestarikan nilai unggul budaya. Keberhasilan pencapaian tujuan strategis ini diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial.



**Tabel. 3.3**  
**Capaian Kinerja Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	51,16	73,99	144,63

### Uraian Kinerja

Prosentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sosial. Angka ini diperoleh dari tiga variabel yang mengukur keadaan ketentraman dan ketertiban umum. Yaitu, penanganan penyakit masyarakat, menurunnya angka kriminalitas dan penurunan pelanggaran K3 yang mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya.

Penyakit masyarakat tertangani sepanjang tahun 2018 adalah 73 kasus. Kasus kriminalitas sebanyak 194 kasus, sedangkan Persentase Penanganan Pelanggaran K3 berupa penertiban PGOT di wilayah Kabupaten Pati, pengamanan unjuk rasa, obyek vital di wilayah Kab. Pati, Penanganan Pelanggaran K3 pada tahun 2018, sebesar 94,05 persen atau 158 kasus dari 168 kasus yang ditemukan, Presentase Penurunan Penyakit Masyarakat pada tahun 2018, dicapaian sebesar 0,58.

### Evaluasi dan Analisa Kinerja

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Data Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial**

INDIKATOR	DATA 2016	REALISASI 2018	TARGET 2022
Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan ketertiban Sosial	39,07	73,99	75

Berdasar kondisi tahun 2016, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban 39,07%, diharapkan Pada akhir RPJMD tahun 2022 dicapai 75%, sedangkan pada tahun 2018 ini target yang ditetapkan adalah sebesar 51,16 persen, terealisasi 73,99 persen. Capaian kinerja sasaran tahun 2018 sangat tinggi dengan capaian indikatornya sebesar 144,63 persen.

Untuk menunjangnya dilaksanakan 13 program sebagai berikut; Program Pengembangan Nilai Budaya, Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program perencanaan sosial dan budaya, Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), Program pendidikan politik masyarakat dan Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dengan anggaran total Rp. 10.181.813.775 atau 1,53% dari anggaran langsung yang prioritas.

Dengan capaian kinerja 144,63 persen, penggunaan anggaran dalam rangka Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya dinilai efisien karena dari anggaran Rp. 12.456.481.875 terealisasi Rp. 10.956.634.488 atau terserap 87,96, efisiensi sebesar 12,04 persen.

### 3.2.2 Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati tercermin pada capaian Indikator “Indeks Pembangunan Manusia”. IPM dapat menggambarkan progres perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah, bagaimana capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonominya.

**Tabel. 3.5**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
<b>IPM (Indeks Pembangunan Manusia)</b>	69,82	70,95	101,62%

### **Uraian Kinerja**

Pada tahun 2018 target IPM Kabupaten Pati adalah 69,82, sampai dengan akhir tahun 2018 realisasinya sebesar 70,95 yang berarti capaian kinerjanya adalah 101,62 persen, masuk dalam kriteria sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya yaitu, Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah, angka rata-rata lama sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH). Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita

Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, tahun 2018 Angka harapan hidup Kabupaten Pati sebesar 73,7.

Pengetahuan yang dihitung dari Angka melek huruf Kabupaten Pati sebesar 94,3. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya = 892.225, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas = 917.403

Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita, PDRB Perkapita Kabupaten Pati tahun 2018 sebesar Rp. 31.816.114,00.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

Angka IPM Kabupaten Pati cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka IPM pada tahun 2015 sebesar 68,51 persen meningkat menjadi 69,03 persen pada tahun 2016, 70,12 persen pada tahun 2017 dan menjadi 70,62 persen pada tahun 2018. Apabila dilihat dari indikator-indikator penyusunnya, dari tahun ke tahun juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup mencapai angka 75,80 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 12,29, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,08 tahun, dan Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) mencapai 9,8 juta rupiah. Pada tahun 2018, bila dibandingkan 5 kabupaten sekitar, angka IPM Kabupaten Kudus merupakan angka tertinggi yaitu 73,84 persen pada tahun 2017, IPM Kabupaten Pati sebesar 70,12 persen, sedangkan Kabupaten Blora memiliki IPM terendah dengan angka 67,52 persen. Dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari tahun 2017-2022 dan target yang harus dicapai pada akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan**  
**Data IPM**

INDIKATOR	DATA 2017	REALISASI 2018	TARGET 2022
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,12	70,93**	73,00

\*\* Data proyeksi

Bila pembangunan terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi berjalan dengan baik, setidaknya sama dengan tahun-tahun yang telah berjalan, mengacu kepada rerata kenaikan IPM Kabupaten Pati, maka target akhir RPJMD dapat dicapai pada akhir tahun RPJMD, bahkan pada tahun 2021 atau setahun sebelum masa RPJMD berakhir yaitu sebesar 73,49.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2018 kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program-program sebagai berikut; Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo", Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen", Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat, Program Pendidikan Non Formal, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular semuanya ada 27 program dengan anggaran Rp. 320.157.109.750 atau 48,12% dari belanja prioritas.

Capaian kinerja Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, sangat tinggi yaitu 101,62 pemerintah mengalokasikan Rp. 386.837.342.975 terealisasi Rp. 346.534.147.767 atau dengan serapan anggaran 89,58 persen. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10.42 persen.

### 3.2.3 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia.

Upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia ini dilakukan untuk menjamin keadilan pembangunan pada masing-masing gender.

**Tabel.3.7**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender,**  
**untuk mendukung kualitas sumber daya manusia**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
IPG (Indeks pembangunan Gender)	92,01	92,52	100,56
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	66	69,02	104,58

## ***Uraian Kinerja***

Keberhasilan tujuan diukur dengan dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2018 target IPG adalah 92,01 dan realisasi 92,52 artinya capaian kinerjanya sebesar 100,56 persen. Untuk IDG dari target 66 , pada tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati adalah 69,02 atau 104,58 persen.

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan.

Program Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diimplementasikan pada kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program Keserasian kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diimplementasikan pada kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi anggaran sebesar Rp. 314,014,500,00 untuk program tersebut.

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak. Dengan demikian setiap OPD dalam penyusunan rencana dan anggaran akan memiliki muatan responsive gender yang dampak lanjutannya akan terasa di masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan pada masing-masing OPD di Kabupaten Pati.

Program berikutnya adalah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak memiliki dua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu : Evaluasi pelaksanaan PUG dan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak. Untuk Realisasi anggaran pada program ini adalah Rp. 30.014.550,00. Program tersebut mempunyai indikator, yaitu Persentase Lembaga Perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak. Hal ini member support yang bagus bagi lembaga perempuan di Kabupaten Pati.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan juga menjadi salah satu poin penting yang menjadi pendongkrak kenaikan IPG dan IDG di Kabupaten Pati. Dengan Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 49.773.325,00 memberi peranan berupa terlindunginya perempuan dalam berbagai kasus yang dilaporkan.

Selanjutnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial terdapat Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Program ini ditopang dengan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dan Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 70.595.800,00 untuk program ini.

## ***Evaluasi dan Analisa kinerja***

IPG Kabupaten Pati di tahun 2018 naik 0,54 poin dari tahun 2017 yaitu sebesar 91,98. IDG Kabupaten Pati tahun 2018 1,06 poin dari tahun 2017 sebesar 67,96. Capaian masing-masing indikator juga memperlihatkan trend kenaikan pada lima tahun terakhir, yang memberikan keyakinan bahwa target IPG dan IGD pada akhir periode RPJMD 2017-2022 yaitu sebesar 93,00 dan 70,00 akan tercapai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi Indikator Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender, untuk mendukung kualitas sumber daya manusia**

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,99	91,06	91,71*	91,98	92,52**
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,95	65,74	67,20*	67,96	69,02**

\* data proyeksi

\*\* data sementara

Dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD, capaian IPG telah mencapai 99,48 persen pada tahun 2018, dan IDG mencapai 98,6 persen, sehingga pada akhir masa RPJMD diharapkan target tercapai.

Tren kenaikan IPG dari tahun ke tahun (Tabel 3.7) menunjukkan kecepatan pertumbuhan IPM yang makin menuju keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat lebih jauh penyebabnya, maka semua komponen baik pendidikan, kesehatan maupun pengeluaran berkontribusi dalam memperkecil perbedaan kecepatan pertumbuhan IPM laki-laki dan perempuan. Dinas Sosial Kabupaten Pati melalui program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD memberi pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian IPG pada tahun 2018.

Demikian halnya dengan IDG yang menunjukkan tren membaik dari capaian tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan makin tingginya capaian pemberdayaan gender di wilayah kabupaten Pati. Peningkatan pendidikan dan keahlian perempuan, merupakan salah satu upaya meningkatkan kapabilitas perempuan di semua bidang khususnya di bidang politik dan ekonomi.

Keseluruhan Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan ini ada 8 program yaitu; Program Keluarga Berencana, Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program pelayanan kontrasepsi, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Yang dianggarkan sebesar RP. 9.116.283.964 atau 1,37% dari belanja langsung yang utama mendukung program prioritas.

Dua indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia tercapai sangat tinggi yaitu 100,56 persen dan 104,58 persen. Anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 6.880.678.914 atau 76,74 persen dari Rp. 8.965.776.014, yang berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar 23,26 persen.

### 3.2.4 Penurunan tingkat kemiskinan

Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan yaitu, Tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan PDRB Perkapita.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Tingkat Kemiskinan	10,53	9,9	105,98
Indeks Gini	0,33	0,31	106,06
PDRB Perkapita	27.754.932	31.816.114	114,63

#### **Uraian Kinerja**

Tingkat Kemiskinan 9,9 Jika dibuat angka, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati pada 2018 berada pada kisaran 123.900 orang, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang jumlahnya 141.700 jiwa. Sehingga jumlah penduduk miskin dalam waktu satu tahun berkurang sebanyak 17.800 orang. "Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan. P1 menurun dari



1,442 pada tahun 2017 menjadi 1,371 pada tahun 2018, dan P2 turun dari 0,349 pada tahun 2017 menjadi 0,293 di tahun 2018," (bps 2018) dengan, PDRB Perkapita Kabupaten Pati tahun 2018 sebesar Rp. 31.816.114,00, Indek GINI tahun 2018 di angka 0,31 artinya terjadi distribusi pendapatan atau kekayaan yang sudah cukup merata , tetapi masih belum sempurna di antara populasi penduduk di Kabupaten Pati .

Penurunan kemiskinan ditopang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 3,61 Persen masih terdapat pengangguran 23.485 dari angkatan kerja total 651.050, dan Tingkat partisipasi angkatan kerja 66,52 Persen dari 651.050 angkatan kerja 978.797 penduduk 15+. Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 58,71 yaitu PDRB ADHB 36,602,305.57/ jumlah tenaga kerja 623,40. Persentase penyerapan tenaga kerja 61,77 % maksudnya jumlah penempatan tenaga kerja 6.696 Orang dari jumlah lowongan kerja yang tersedia 10.840 Orang. Status desa di Kabupaten Pati dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM) 0,644 termasuk dalam kategori Desa Berkembang ( > 0,599 dan < 0,707). Persentase pengurangan kawasan kumuh 0,497, (172,58 - 76,01 Ha ) dibagi dengan jumlah luas permukiman 19.428,48 Ha.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Indikator**  
**Tingkat kemiskinan**

<b>INDIKATOR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Tingkat Kemiskinan</b>	12,06	11,65	11,38	9,9
<b>PDRB Perkapita</b>	25,36	27,28	29,36	31.81

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian, yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Oleh karena itu, masalah kemiskinan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian serta pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pati yang dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Pergerakan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun cenderung turun. Pada tahun 2018 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pati adalah 9,9 , target 2018 adalah 10,53 yang berarti capaian kinerja sebesar 105,98 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 12,06, tahun 2015 sebesar 12,06 dan 2016 pada angka 11,65. Penurunan ini berlanjut lagi pada tahun 2017 yaitu menjadi 11,38 dan tahun 2018 pada 9,9.

Sementara PDRB perkapita Kabupaten Pati pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita Kabupaten Pati sebesar 25,36 juta rupiah naik menjadi 27,28 juta rupiah pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mencapai 29,36 juta rupiah. tahun 2018 mencapai 31.81.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Pati pada tahun 2018 yaitu sebanyak 9,9 persen, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 11,38 persen. Persentase ini lebih rendah dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah yang pada tahun 2018 sebesar 11,32 persen. Jika dilihat dari lima kabupaten di sekitar Pati, persentase penduduk miskin pada tahun 2018 terendah adalah Kabupaten Kudus sebanyak 6,98 persen dan tertinggi Kabupaten Rembang sebanyak

15,41 persen, sementara Kabupaten Grobogan sebesar 12,31 persen, Kabupaten Blora 11,90 persen dan Kabupaten Jepara 7 persen.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pati, telah melaksanakan 12 program yaitu; Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pengembangan Perumahan, Program pengembangan wilayah transmigrasi, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, Program transmigrasi regional, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pembinaan panti asuhan /panti jompo, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dan Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga, yang didukung dengan anggaran sebesar 0,81% dari seluruh anggaran prioritas yaitu Rp. 5.368.202.925. mengalami penambahan dalam perubahan hingga sebesar Rp. 6.242.514.025,00 terserap hingga 98,13%.

Dari tiga indikatornya tercapai sangat tinggi semua (105,98), (106,06) dan (114,63), sehingga Penurunan tingkat kemiskinan dengan anggaran Rp. 6.242.501.650 yang terealisasi Rp. 6.126.060.033 atau 98,13 persen dinilai efisien. Besaran efisiensi anggaran adalah 0,87 persen.

### 3.2.5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Akan tetapi karena Kabupaten Pati belum pernah dievaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasinya oleh Kementerian PAN & RB, maka yang digunakan untuk mengukur adalah skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian Mandiri tersebut mengukur delapan area perubahan dengan delapan indikator proses (faktor pengungkit) dan tiga indikator hasil.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja**

#### Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	63	69,15	109,76

#### **Uraian kinerja:**

Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dengan diterbitkannya SK Bupati No. 061/1383 Tahun 2018 untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi.

Penataan peraturan perundang-undangan dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dan telah dilakukan Revisi atas peraturan perundang-undangan.

Penataan dan penguatan organisasi dengan melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi, mengevaluasi dan menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain serta mengevaluasi dan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Nilai Kapasitas Organisasi (survey Internal) skor 3,65.

Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll), namun belum terintegrasi. Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui website untuk penyediaan

informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan serta dalam tingkatan transaksional yaitu masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, juga telah dilaksanakan walaupun belum terintegrasi.

Penataan sistem manajemen sdm, Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan. Perhitungan kebutuhan pegawai, redistribusi pegawai serta perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif serta ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen.

Terdapat sistem informasi kepegawaian yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam SIMPEG BKPP dapat diakses oleh pegawai melalui operator tiap unit kerja .

Nilai SAKIP 52,83, Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan penyusunan Penetapan Kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan

Seluruh rekomendasi APIP yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko.

Kualitas Pelayanan Publik sebesar 7,75 dengan sub unsur Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (survey Eksternal) sebesar 7,75. Karena terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan. Sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu serta terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan contohnya adalah SIM ULP Kabupaten Pati.

### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Data Indikator**  
**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

INDIKATOR	2017	2018	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	65,2	69,15	65

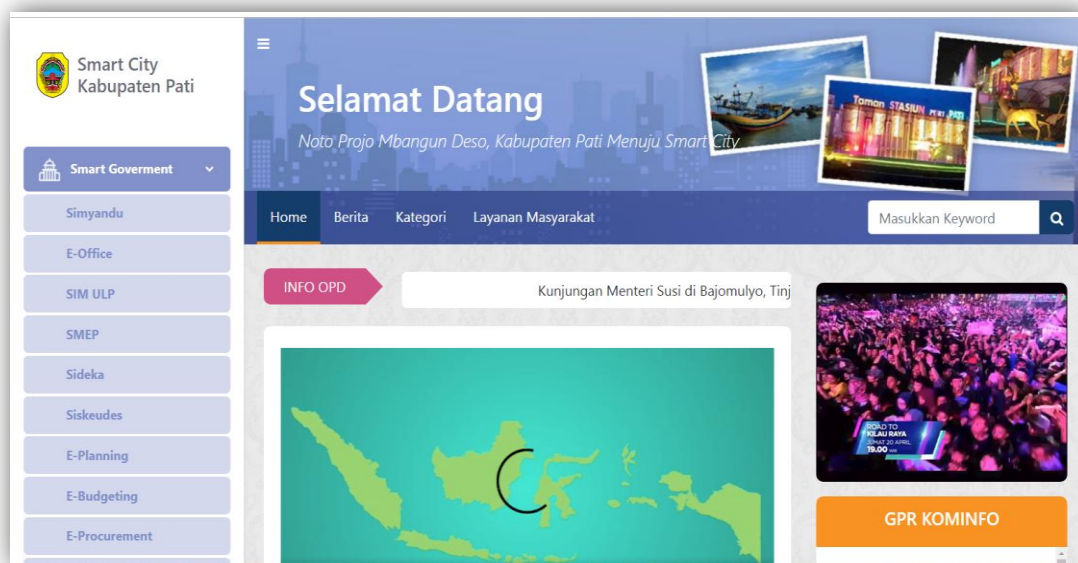
Dari Tahun ke Tahun skor PMPRB Kabupaten Pati meningkat dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Kabupaten Pati menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi pada akhir masa RPJMD sebesar 65. Melihat peningkatan skor PMPRB meskipun penilaian masih dilakukan secara mandiri, diyakini pada akhir masa RPJMD target dapat dicapai.

Pada tahun 2018 Skor PMPRB Kabupaten Pati adalah sebesar 69,15. Meningkatkan dibandingkan pada tahun 2017 dengan skor sebesar 65,2. Pengukuran pada tahun 2018 pada komponen proses diperoleh skor 47,35 dari total skor 60 atau 78,92 persen. Penyumbang komponen proses tersebut meliputi nilai pada Area Manajemen Perubahan sebesar 4,44; Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar 4,38; Penataan dan Penguatan Organisasi sebesar 5,01; Penataan Tata Laksana sebesar 4,38; Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sebesar sebesar 12,8; Penguatan Akuntabilitas sebesar 5,54; Penguatan Pengawasan sebesar 5,08; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 5,72.

Hal yang harus diupayakan di tahun berikutnya adalah penyusunan kebijakan tentang Whistle Blowing System (WBS) dan penyusunan aplikasi terkait WBS karena selama ini baru sosialisasikan ke semua Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah terkait

Penanganan Benturan Kepentingan, monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Kabupaten Pati memiliki rencana penerapan teknologi informasi, tahun ini telah launching 4 aplikasi yang teritegrasi dalam Pati Smart City yaitu Gage Nda, e-office, e-sakip dan Pati Smart City itu sendiri.



Gambar 3. 1 SmartCity Kabupaten Pati

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung anggaran sebesar RP 55.466.459.530,00 digunakan untuk mencapai tujuan daerah tahun 2018 dengan menjalankan; Program peningkatan disiplin aparatur, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program pengembangan data/informasi, Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, Program pembinaan dan pengembangan aparatur, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Peningkatan Professionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik, Program kerjasama informasi dengan mas media, Program perencanaan pembangunan daerah, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, seluruhnya menggunakan 8,34% dari total belanja untuk pembiayaan program prioritas.

Dalam rangka Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah menganggarkan Rp. 59.759.514.025 yang terserap Rp. 53.581.010.968 dengan capaian kinerja mencapai 109,76 persen. Penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, karena dengan 89,6 persen anggaran telah dapat mendukung tercapainya target, sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar 10,4 persen

### 3.2.6 Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah

Dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah , Target PDRHB ADHK 2018 sebesar Rp. 26.906.244,00, realisasi sebesar Rp. 29.012.457,00 , capaian kinerja sebesar 108,76%.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Lokal dan Produktifitas Daerah**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Nilai PDRB ADHK	26.906.244	29.012.457	107,83

#### **Uraian Kinerja**

Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.

Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 58,71 yaitu PDRB ADHB Rp. 36.602.305,57 dibagi tenaga kerja 623,40, Atau 44,16 PDRB ADHK Rp. 27.532.168,10 dianding 623.407 Tenaga Kerja.

Persentase penyerapan tenaga kerja 61,77 persen maksudnya jumlah penempatan tenaga kerja 6.696 Orang dari jumlah lowongan kerja yang tersedia 10.840 Orang.

Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi 14 unit, hanya 8 persen KSP/USP yang sehat di Kabupaten Pati, dari 202 KSP/USP.

#### **Evaluasi dan Analisa Kinerja**

**Tabel 3.14**  
**Data PDRB ADHK**

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Target 2022
Nilai PDRB ADHK	27.532.168	29.012.457	31.198.037,64

PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB Kabupaten Pati pada tahun 2017 sebesar Rp.36.602 milyar. Lapangan Usaha yang paling banyak berkontribusi dalam pembentukan PDRB ini adalah lapangan usaha Industri pengolahan yang mencapai 26,70 persen. Pada lapangan usaha ini yang menjadi unggulan adalah Industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 19,01 persen. Kontribusi terbesar kedua sebanyak 25,57 persen berasal dari lapangan usaha. Pertanian, Kehutanan & Perikanan. Lapangan usaha Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor berada pada urutan ketiga memberi kontribusi sebesar 14,34.

**Tabel 3.15**  
**Perkembangan PDRB di Kabupaten Pati Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
❖ PDRB ADHK (2010=100) (Juta Rp.)	24.770.325	26.121.955	27.532.168
❖ PDRB ADHB (Juta Rp.)	31.263.149	33.830.860	36.602.305
❖ PDRB/Kapita ADHB (Rp.)	25,36	27,28	29,36
❖ Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	5,46	5,40

Sumber : BPS Kabupaten Pati



Upaya meningkatkan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah program-program yang dilaksanakan Kabupaten Pati adalah, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program pengembangan destinasi pariwisata, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, Program peningkatan kemampuan teknologi industri, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, Program peningkatan produksi hasil peternakan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program pengembangan perikanan tangkap, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program peningkatan produksi peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program pengembangan budidaya perikanan dan Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. Pada tahun 2018 dana yang diserap Rp. 22.667331.515 rupiah, 92,24% dari yang dianggarkan dalam perubahan sebesar Rp. 24.575.598.750,00. Dengan pencapaian kinerja 107,83 menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,76 persen.

### 3.2.7 Mekuatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/sektor pertanian, perdagangan dan industri, meningkatnya investasi daerah, daya saing daerah dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, Inflasi Daerah Kabupaten Pati Th 2018 sebesar 2,77, tercapai 107,67 persen

**Tabel 3.16**

**Capaian Kinerja Mekuatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,33	5,5	103,19
Inflasi Daerah	3,00-5,00	2,77	107,67

#### **Uraian Kinerja**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati tahun 2018 sebesar 5,5, capaian kinerja 103,19 persen, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,40 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.

Lapangan Usaha yang paling banyak berkontribusi dalam pembentukan PDRB ini adalah Lapangan usaha Industri pengolahan yang mencapai. Pada lapangan usaha ini yang menjadi unggulan adalah Industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar Rp.7.270.129,00 PDRB sektor perdagangan Rp. 5.143.242,00 Kontribusi terbesar kedua sebanyak 25,57 persen berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan & Perikanan. Lapangan usaha Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor berada pada urutan ketiga memberi kontribusi sebesar 14,34 persen.

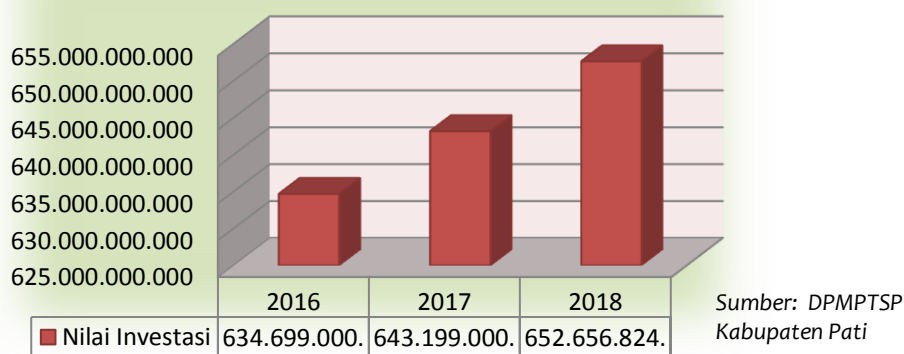
Produktivitas komoditas unggulan di sektor industri 5,311 di tahun 2018 tumbuh sebesar 5,80%, dari produktivitas 5,024 di tahun 2017.

NTP Kabupaten Pati tahun 2018 sebesar 102,46. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) Ib (indeks yang dibayarkan petani) = 132,36 ; It (indeks yang diterima petani) = 135,62.

Jumlah kunjungan wisata tahun 2018 sebanyak 1.623.400 wisatawan, tumbuhan 19,61 persen dari tahun 2017 sejumlah kunjungan wisata tahun 1.357.254 wisatawan,

Pertumbuhan investasi daerah 1,47%. Hal ini masih bisa dimaksimalkan dengan mengurangi faktor penghambat yaitu keterbatasan lokasi dan bahan baku.

**Grafik 3.1**  
**Nilai Investasi KAB. PATI**



Inflasi Daerah Kabupaten Pati Th 2018 sebesar 2,77, tercapai 107,67 persen, masuk baik karena, inflasi berada dibatas batas bawah dari range 3,00-5,00 dan dibawah Inflasi Nasional 3,13 persen. Inflasi di Kabupaten Pati yang cenderung rendah, salah satunya di karenakan stabilnya harga - harga komoditas terutama komoditas makanan. Beberapa komoditas yang harganya cenderung turun yaitu bawang merah, cabai, beras dan gula yang berpengaruh pada menurunnya harga makanan jadi, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas usaha karena adanya ketersediaan modal usaha dengan bunga yang lebih murah. Berdasarkan kondisi inflasi ini, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus dapat mengendalikan angka inflasi yang posisinya baik ini, agar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Evaluasi dan Analisa Kinerja

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan data pertahun**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah**

INDIKATOR KINERJA	DATA 2017	REALISASI 2018	TARGET 2022
Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi	5,40	5,5	5,6
Inflasi Daerah	3,51	2,77	3

Salah satu indikator stabilitas perekonomian daerah adalah terkendalinya pergerakan harga barang dan jasa, yang dapat dilihat melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan besaran angka yang menunjukkan perbandingan harga dibanding dengan tahun dasar.

Angka Inflasi yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen, di Kabupaten Pati tahun 2017 sebesar 2,77 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,51 persen.

Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri Sebesar 5,80 persen, dari produktivitas 5,024 di tahun 2017 menjadi 5,311 di tahun 2018, Pertumbuhan industri kreatif daerah 7,80 persen. Jumlah industri kreatif 329 di tahun 2017, sekarang terdapat 355 industri kreatif.

Pemerintah Kabupaten Pati beserta perangkat daerah mengupayakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dengan menyelenggarakan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif,

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Program pengembangan Kemitraan, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, Program penataan struktur industry, Program pengembangan sistem informasi pertanahan, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Anggaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah sebesar Rp. 82.310.746.775 setelah perubahan, dengan serapan anggaran sebesar 96,71 persen. Dengan dua indikator yang pengukurannya tercapai 103,19 persen dan 17,67 persen dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,29 persen.

### 3.2.8 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, sasaran yang hendak diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pati yaitu terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 81,72 persen yang berarti capaian kinerja sebesar 116,70 persen.

**Tabel 3.18**

**Capaian kinerja Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi sesuai standar pelayanan	70,03	81,72	116,70

#### **Uraian Kinerja**

Jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting, tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah di jangkau (tingkat aksesibilitas). Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka perkembangan wilayah akan mengalami kelancaran. Sehingga semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut.

Sarana dan prasarana yang disuatu wilayah berupa jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, kendaraan (darat, udara, dan laut), terminal, pelabuhan, dan lain-lain memberikan landasan terhadap kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Sarana dan prasarana transportasi akan menunjang dan mendukung pembangunan secara fisik. Dalam hal ini, untuk memudahkan pelayanan dan menghindarkan kemacetan perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan peran pemerintah setempat dan masyarakat serta dunia usaha. Pada tahun 2018, panjang jalan yang dalam kondisi mantab sepanjang 1.036.793 km ( beraspal baik 845.500 km dan beraspal sedang 191.293 km ) dari total 1.466.237 km, sedangkan Jumlah jembatan yang baik

adalah sebanyak 276 jembatan. Faktor aksesibilitas memegang penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa di dukung oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Kabupaten Pati memiliki 327 daerah irigasi dengan jaringan irigasi dalam kategori baik sepanjang 638.563.332 m dari total 747.995.000 m. Jaringan irigasi ini bertanggungjawab dalam pengairan 20.970.000 ha areal tanam. Penyediaan air baku yang terdiri dari air bersih dan air irigasi daerah mencapai 81,75 persen.

Pencapaian ini didukung dengan program-program pembangunan jalan dan jembatan, Program Peningkatan Jalan & Jembatan, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program pembangunan infrastruktur perdesaan, Program pengaturan jasa usaha konstruksi, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Pogram peningkatan pelayanan angkutan, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program pembangunan sistem informasi/data base infrastruktur, dan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor,

**Evaluasi dan Analisa Kinerja**

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah telah berupaya membangun jalan khususnya pelebaran jalan dan perbaikan kualitasnya.



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Pati 2018

Sampai dengan tahun 2017 pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang 837,4 ribu kilometer jalan kabupaten, sementara pemerintah propinsi dan pusat telah membangun jalan sepanjang 115,7 ribu kilometer jalan propinsi, dan 32,7 kilometer jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pati. Dari total panjang jalan yang ada, di Kabupaten Pati sebesar 100 persen permukaannya sudah di aspal. Panjang jalan dari tahun ke tahun tidak mengalami kenaikan yang berarti, sebaliknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mengalami kenaikan dalam jumlah yang cukup besar. Banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati mengalami penurunan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang didukung oleh anggaran perubahan sebesar Rp. 255.461.768.600,00 dan telah dimanfaatkan sebesar Rp. 246.537.374.579,00 atau sebesar 96,51 persen, terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,49 persen.

### 3.2.9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai kualitas lingkungan dari suatu kota/kabupaten yang terdiri dari kualitas air, udara dan vegetasi.

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja**  
**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,99	51,20	94,83

#### **Uraian Kinerja**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur dari 30 persen Indeks Kualitas Udara (IPU), 30 persen Indeks Kualitas Air (IPA), dan 40 persen Indeks Tutupan Vegetasi (ITV). IKLH tahun 2018 sebesar 51,20 atau 94,83 persen dari target tahun 2018 sebesar 53,99.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pati pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan metode infinger adalah sebesar 95,53. Parameter SO<sub>2</sub> didominasi berasal dari wilayah yang terkena dampak dari pemukiman, sedangkan parameter NO<sub>2</sub> didominasi oleh wilayah yang padat kendaraan bermotor.

Indeks kualitas air sungai Kabupaten Pati dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform kontributor, pencemar tidak dicantumkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang diukur sebanyak 7 sungai yaitu Sungai Sani, Jiglong dan Lengkowo di lokasi hulu, tengah dan hilir selama musim kemarau dan penghujan, kontributor pencemar masing-masing sungai 3 lokasi sehingga masing-masing sungai terdiri dari 9 (sembilan) sampel, total 27 sampel. Kemudian Sungai di Margoyoso yaitu Sungai Suwatu dan Sungai Pangkalan, Hulu, Tengah, dan Hilir musim Penghujan dan Kemarau sebanyak 12 sampel serta kontributor pencemar sebanyak 5 sampel. Sungai di Tambakromo dan di Sukolilo sebanyak 5 sampel. Total titik sample kualitas air sungai yang diambil pada tahun 2018 sebanyak 49 titik, bahwa kualitas air sungai yang tidak ada yang memenuhi Baku Mutu, Tercemar Ringan sebanyak 15 titik, Tercemar Sedang sebanyak 10 titik, dan Tercemar Berat sebanyak 24 titik. Dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air, maka dihasilkan angka Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Pati Tahun 2018 sebesar 26,3265. Parameter yang mendominasi memburuknya kualitas air sungai adalah parameter BOD dan COD.

Indek Tutupan Vegetasi Tahun 2018 sebesar 36,60. Hasil perhitungan belum termasuk jumlah luasan tegalan dan semak belukar yang belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang diperoleh. Sedangkan ITV tahun 2017 sebesar 36,56 dapat diartikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan.

#### **Evaluasi dan analisa kinerja**

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Data**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Target 2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,37	51,20	69,01

Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 menurun 5,17 persen dibandingkan pada Tahun 2017 yang sebesar 53,37. Penurunan terjadi pada IPU dan IPA sedangkan ITV mengalami kenaikan. Indeks Kualitas Udara (IPU) tahun 2018 sebesar 95,53 naik 13,98 persen dari capaian tahun 2017 sebesar 70,03, Indeks Kualitas Air (IPA) sebesar 26,33 turun



21,27 persen dari tahun 2017 47,60, sedangkan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV) naik 0,04 persen dari 36,56 pada tahun 2017 menjadi 36,6 pada tahun 2018.

Berdasarkan perhitungan IKLH 2018, upaya yang lebih besar dalam pengelolaan lingkungan hidup berlaku terhadap seluruh wilayah. IKLH Kabupaten Pati yang berada pada angka **51,2** memiliki arti **SANGAT KURANG**. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan besaran 53,37 terjadi penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. berdasarkan perhitungan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penurunan tersebut adalah Indeks Kualitas Air Sungai, dari hasil sebaran terdapat kontributor utama penurunan kualitas air sungai yaitu kegiatan domestik dan kegiatan komersial di sekitar sungai. IKLH Kabupaten Pati yang masuk dalam Kategori Waspada ini dapat dijadikan usaha bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan sesuatu dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan.



*Gambar 3.2 Karang Taruna Kabupaten Pati mengikuti aksi penanaman mangrove di pesisir pantai desa Kertomulyo kecamatan Trangkil.*

Yang telah dijalankan di tahun 2018 adalah, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan, besar anggaran tahun 2018 Rp. 25.001.176.200 atau 3,76% dari total anggaran prioritas.

Program kegiatan pendukung Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dianggarkan pemerintah Rp. 24.775.951.700 dan terserap 90,68 persen atau terealisasikan Rp. 22.467.126.909, efisiensi sebesar 9,32 persen.

### 3.2.10 Menurunnya resiko bencana

Menurunnya resiko bencana, di ketahui dari indeks resiko bencana. Semakin kecil nilainya maka resiko semakin kecil, tahun 2018 target Kabupaten Pati ditetapkan 164, realisasi pada angka 157,41 atau tercapai 104,02 persen

**Tabel 3.21**

**Capaian Kinerja Menurunnya resiko bencana**

INDIKATOR KINERJA	T	R	CAPAIAN
Penurunan Indeks Resiko Bencana	164	157,41	104,02

#### **Uraian Kinerja**

Diukur dengan indikator Penurunan Indeks Resiko Bencana. Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

**TABEL 3.22**  
Kejadian Bencana Tahun 2018

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KERENTANAN		
			Kerugian (Milyar Rupiah)	kerusakan lingkungan (Ha)	Jiwa terpapar (per km <sup>2</sup> )
1	Banjir	50 Desa	1,91	204	990
2	Tanah longsor	9 titik longsor 9 Desa	3,4	450	400
3	Kekeringan	110 desa	2,5	110	800

Pada tahun 2018 ada tiga jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Pati, yaitu Banjir, Tanah longsor dan kekeringan, kerugian yang diakibatkan sebesar 7,81 milyar rupiah dengan luar area 764 (ha), jumlah jiwa yang terpapar per Km2 sebanyak 2.190.



Gambar 3.3  
Banjir Wilayah Kec. Jakenan, Sabtu, 6/1, 2018

### Evaluasi dan Analisa Kinerja

**Tabel 3.23**  
Perbandingan Indeks Resiko Bencana

INDIKATOR KINERJA	Data 2017	Realisasi 2018	Target 2022
<b>Penurunan Indeks Resiko Bencana</b>	169	157,41	144

Kondisi awal perencanaan jangka menengah daerah RPJMD, indeks resiko bencana Kabupaten Pati tahun 2017 sebesar 169, tahun ini telah mampu menurunkan 14,30 poin, hal ini dimungkinkan karena untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana telah dibentuk desa tangguh bencana, yaitu desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana. Desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana, memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya.

**Tabel 3.24**  
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana**

Tahun	Jumlah	Lokasi dan Anggota
2015	5	Kec. Pati Desa Sugiharjo, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Kosekan, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Banjarsari, P=10 L=20
		Kec. Gabus Desa Babalan, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Karangrowo K, P=10 L=20
2017	1	Kec. Jakenan Desa Ngastorejo, P=10 L=20
2018	2	Kec. Gabus Desa Mintobasuki, P=10 L=20
		Kec. Jakenan Desa Tondomulyo, P=10 L=20

Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Yang telah dilaksanakan di tahun 2018 adalah Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang secara langsung mendukung tercapainya penurunan resiko bencana dianggarkan sebesar Rp. 2.407.379.800 yaitu 0,36% dari anggaran prioritas.

Dalam upaya Menurunnya risiko bencana ditambahkan dalam anggaran perubahan pemerintah hingga Rp. 2.411.090.200, yang terserap 84,29 persen atau terealisasi Rp. 2.032.310.560. Pencapaian kinerjanya 104,02 persen dibarengi dengan efisiensi sebesar 15,71 persen.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi Rp. 3.020.058.146.000,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.886.499.766.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.133.558.380.000,00

**Tabel 3.25**  
**Anggaran Belanja Daerah Perubahan**

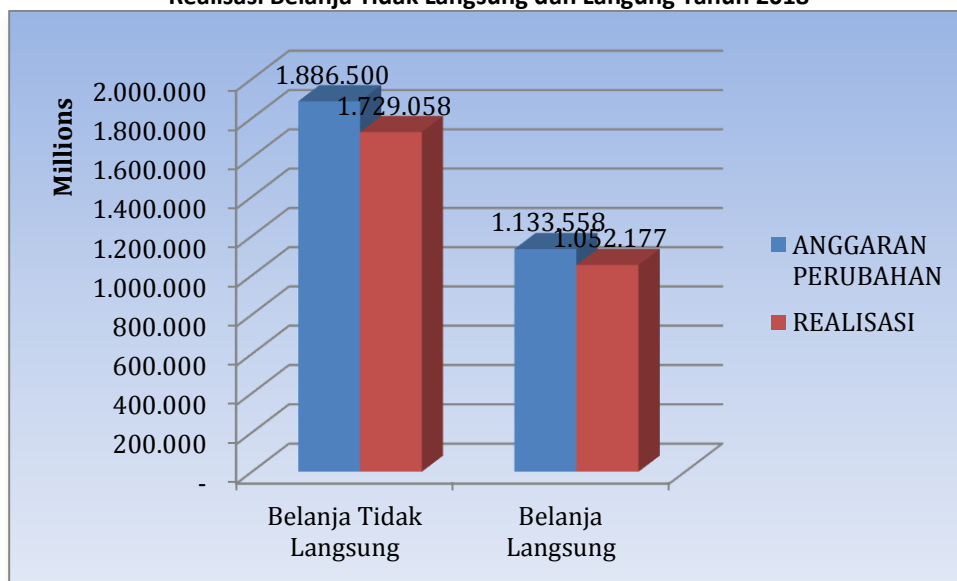
URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	%
Belanja Tidak Langsung	1.886.499.766.000	62,47
Belanja Langsung	1.133.558.380.000	37,53
Total Belanja	3.020.058.146.000	100,00

Terdapat penambahan anggaran belanja untuk yang dipergunakan untuk membiayai pencapaian sasaran mengalami kenaikan 14,09% sebesar Rp. 372.926.096.000,00 dari APBD sebelum Perubahan

Total realisasi belanja 2018 sebesar Rp. 2.781.234.687.644,00 dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.729.057.545.223,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.052.177.142.421,00

Belanja langsung yang utama untuk program-program prioritas sebesar Rp. 2.781.234.687.644,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terserap rata-rata 90,25 persen program/kegiatan di sasaran. Menurunnya angka kemiskinan menyerap anggaran tertinggi belanja prioritas (98,13%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ketiga yaitu Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia (76,74%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 seperti terlihat dibawah ini :

**Grafik. 3.3**  
**Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung Tahun 2018**



Anggaran belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.26**  
**Realisasi Anggaran Belanja Prioritas (dalam rupiah) Tahun 2018**

NO	TUJUAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	10.181.813.775	12.456.481.875	10.956.634.488	87,96
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	320.157.109.750	386.837.342.975	346.534.147.767	89,58
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	9.116.283.964	8.965.776.014	6.880.678.914	76,74
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5.368.202.925	6.242.501.650	6.126.060.033	98,13
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	55.466.459.530	59.759.514.025	53.581.010.968	89,66
6	Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	23.399.946.750	24.575.598.750	22.667.331.515	92,24
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	53.743.069.050	82.310.746.775	79.606.599.613	96,71
8	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	160.495.051.100	254.211.768.600	246.537.374.579	96,51
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25.001.176.200	24.775.951.700	22.467.126.909	90,68
10	Menurunnya risiko bencana	2.407.379.800	2.411.090.200	2.032.310.560	84,29
	<b>TOTAL</b>	<b>665.336.492.844</b>	<b>862.546.772.564</b>	<b>797.389.275.346</b>	
			Rata-rata realisasi		90,25
			Realisasi tertinggi		98,13
			Realisasi terendah		76,74



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai sasaran dengan target indikator yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati 2018 merujuk pada Rencana Strategis Kabupaten Pati 2017-2022 dalam mengelola kepercayaan masyarakat Kabupaten.

Bila dilihat pengukuran indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Kabupaten Pati, semua indikator tercapai dengan kriteria sangat tinggi, meski serapan anggaran tidak mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sakip sebagai sistem diharapkan dapat memberikan sarana bagi pengampu kepentingan dalam mempertahankan kinerjanya.

Secara umum hal yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan kinerja yang sangat tinggi ini, Pemerintah Kabupaten Pati kedepan dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan reuiu kinerja secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas cascading kinerja dengan menggunakan *logic model* yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan dan menjabarkan kinerja organisasi, cascading setiap opd ke level individu dan memanfaatkan untuk pengukuran kineja;
- c. Mengembangkan sistem manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat tercipta *performance base budgeting*;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan meningkatkan kompetensi evaluator. Sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- e. Meningkatkan kualitas basis data di setiap SKPD sehingga proses perencanaan, monitoring, maupun evaluasi program kegiatan maupun kinerja lebih akurat dan berhasil guna;
- f. Melakukan reuiu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran, untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2018 ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *Stakeholder*, dalam upaya akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola



pemerintahan, yang akan memberikan dampak lebih luas pada kemajuan Kabupaten Pati, dengan penyempurnaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, 14 Maret 2019

BUPATI PATI,



**HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Jabatan : BUPATI PATI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pati, 2018

BUPATI PATI

  
**HARYANTO, S.H., M.M., M.SI.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1. <i>Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial</i>	51,16
2. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2. <i>IPM</i>	69,82
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3. <i>IPG (Indeks Pembangunan Gender)</i>	92,01
4. Penurunan tingkat kemiskinan	4. <i>IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)</i>	66
	5. <i>Tingkat kemiskinan</i>	10,53
	6. <i>Indeks Gini</i>	0,33
	7. <i>PDRB Perkapita</i>	27.754.932
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	8. <i>Indek Reformasi birokrasi</i>	63
6. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	9. <i>Nilai PDRB ADHK (= 000.000)</i>	26.906.244
7. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	10. <i>Tingkat Laju pertumbuhan ekonomi</i>	5,33
	11. <i>Inflasi Daerah</i>	3,00 – 5,00
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	12. <i>Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan</i>	70,03
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	53,99
10. Menurunnya risiko bencana	14. <i>Penurunan Indeks Risiko Bencana</i>	164

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 1,933,729,000
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 5,739,016,225
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 2,498,305,325
4.	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rp. 94,433,405,500
5.	Program Keluarga Berencana	Rp. 7,412,302,150
6.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp. 461,831,800
7.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 5,850,927,000



NO	PROGRAM	ANGGARAN
8.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 4,638,037,800
9.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 278,124,000
10.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rp. 75,000,000
11.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 1,139,490,750
12.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 4,395,550,750
13.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp. 75,573,250
14.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 797,971,000
15.	Program Pendidikan Kedinasan	Rp. 298,616,700
16.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 384,064,000
17.	Program pengembangan data/informasi	Rp. 198,315,775
18.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 8,409,400
19.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 2,037,485,000
20.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 1,068,567,500
21.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 210,000,000
22.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 430,680,000
23.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 2,849,990,050
24.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp. 245,327,000
25.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp. 7,957,466,250
26.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 1,360,563,000
27.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 1,408,622,175
28.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 195,000,000
29.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 2,312,279,000
30.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3,243,479,500
31.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 579,876,700
32.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp. 528,476,000
33.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 764,737,400
34.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 414,424,125
35.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 6,144,752,400
36.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Rp. 25,000,000
37.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 2,323,082,200
38.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp. 403,000,000
39.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 535,000,000
40.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 1,381,400,000
41.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 730,000,000
42.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 275,763,600
43.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 298,017,000
44.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	Rp. 772,610,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	Lingkungan Hidup	
45.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 30,014,550
46.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 334,431,000
47.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rp. 4,589,838,955
48.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 1,080,375,500
49.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 863,975,000
50.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp. 6,789,862,650
51.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 328,797,700
52.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp. 117,501,000
53.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 1,880,256,000
54.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 15,377,243,000
55.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 25,256,911,000
56.	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rp. 2,175,416,000
57.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Rp. 20,000,000
58.	Program pelayanan kontrasepsi	Rp. 42,278,739
59.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rp. 15,646,836,400
60.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 135,000,000
61.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 4,530,622,725
62.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 169,200,000
63.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1,777,000,000
64.	Program pengembangan Kemitraan	Rp. 144,792,500
65.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 129,029,000
66.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 152,545,900
67.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp. 107,000,000
68.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 6,112,755,500
69.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 90,000,000
70.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Rp. 50,000,000
71.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 125,284,025
72.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 2,127,221,100
73.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 219,000,000
74.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp. 80,000,000
75.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp. 53,000,000
76.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 230,000,000
77.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 253,132,000
78.	Program transmigrasi regional	Rp. 30,393,000
79.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 135,140,800



NO	PROGRAM	ANGGARAN
80.	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp. 131,713,000
81.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp. 200,000,000
82.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp. 107,059,300
83.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rp. 276,003,675
84.	Program penataan struktur industri	Rp. 140,000,000
85.	Program Pendidikan Non Formal	Rp. 1,386,298,000
86.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Rp. 255,000,000
87.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 14,454,054,000
88.	Program peningkatan kapasitas aparatatur pemerintah desa	Rp. 157,496,000
89.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 279,456,000
90.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Rp. 103,011,000
91.	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Rp. 147,000,000
92.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 793,000,000
93.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp. 101,050,300
94.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 10,406,490,650
95.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 353,705,000
96.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp. 297,065,525
97.	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Rp. 53,466,100
98.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Rp. 15,000,000
99.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 10,000,000
100.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp. 349,401,000
101.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Rp. 195,000,000
102.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 215,905,000
103.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp. 178,785,000
104.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp. 4,438,952,450
105.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rp. 414,451,500
106.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1,182,404,000
107.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Rp. 28,573,900
108.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rp. 719,806,900
109.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp. 308,000,000
110.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp. 1,695,000,000
111.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rp. 62,747,375
112.	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 912,065,000
113.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Rp. 60,500,050
114.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp. 68,000,000
115.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Rp. 7,696,505,000



NO	PROGRAM	ANGGARAN
	Kependidikan	
116.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Rp. 172,969,000
117.	Program peningkatan pengendalian polusi	Rp. 872,500,000
118.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 3,864,953,000
119.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 208,000,000
120.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 1,115,742,775
121.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rp. 405,000,000
122.	Program pendidikan politik masyarakat	Rp. 277,299,500
123.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 125,000,000
124.	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 6,844,280,000
125.	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 50,000,000
126.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1,924,500,125
127.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 9,669,012,000
128.	Program pembangunan sistem informasi/data base infrastruktur	Rp. 200,000,000
129.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp. 183,931,000
130.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 740,487,000
131.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp. 812,177,000
132.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rp. 9,240,000
133.	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Rp. 50,000,000
134.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 169,000,000
135.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 583,797,750
136.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp. 4,184,861,675
137.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 297,000,000
138.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp. 60,000,000
139.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp. 4,733,851,900
140.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Rp. 39,301,550
141.	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 994,508,375
142.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 459,103,500
143.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp. 453,000,000
144.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp. 10,805,540,000
145.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Rp. 170,000,000
146.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 16,941,185,500
147.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Rp. 1,643,255,000
148.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Rp. 8,550,125
149.	Program peningkatan produksi peternakan	Rp. 25,000,000
150.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rp. 565,787,150

NO	PROGRAM	ANGGARAN
151.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp. 6,994,543,400
152.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 91,000,000
153.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 1,448,202,800
154.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 499,495,000
155.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1,573,625,525
156.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 295,454,750
157.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp. 27,309,928,000
158.	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi	Rp. 425,925,000
159.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 6,421,143,200
160.	Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik	Rp. 173,151,850
161.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 21,970,209,250
162.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp. 60,708,000
163.	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp. 1,020,492,150
164.	Program pengaturan jasa usaha konstruksi	Rp. 159,499,900
165.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp. 2,814,858,000
166.	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Rp. 133,428,800,000
167.	Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Rp. 13,000,000,000
168.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Rp. 55,217,000,000
169.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 610,000,000
170.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp. 170,000,000
171.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 20,000,000
172.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 6,376,436,850
173.	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Rp. 7,105,096,150

Pati, 12 Januari 2018  
BUPATI PATI

  
HARYANTO, S.E., M.M., M.SI.